

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PADA DINAS SYARIAT ISLAM KOTA
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**NAMA : FIRMAN SYAHPUTRA
NIM. 431206915
Jurusan Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1437 H/ 2016 M**

SKRIPSI

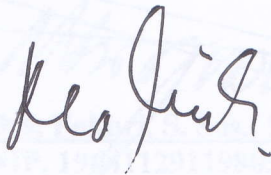
**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Oleh

**NAMA: FIRMAN SYAHPUTRA
NIM. 431206915**

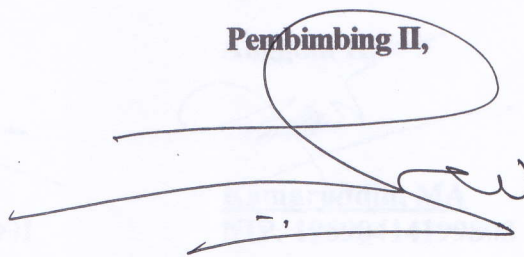
Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**(Drs. H. Maimun Ibrahim, M.Si)
NIP. 19530906 198903 1 001**

Pembimbing II,



**(Sakdiah, S.Ag., M.Ag)
NIP.197307132008012 007**

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh :

FIRMAN SYAHPUTRA
NIM. 431206915

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 09 Agustus 2016 M
06 Dzulqa'idah 1437 H

di

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Drs. H. Maimun Ibrahim, MA
NIP. 19530906198903 1 001

Sekretaris,

Sakdiah, M. Ag
NIP. 197307132008012007

Anggota I,

Drs. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291198031 1 001

Anggota II,

Kamaruddin, MA
NIP. 19690414199803 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
NIP. 19641220198412 2 001

KATA PENGANTAR

“Bismillahirrahmanirrahim”

Puji beserta syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kepada Zat yang Maha Menciptakan, lalu Memelihara dan Memberikan Nikmat serta Daya dan Upaya kepada Makhluk-Nya, berkat semua nikmat yang dianugerahkan tersebut penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Shalawat berbingkai salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasul serta kekasih *Ilahi Rabbi* baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta kepada para Ulama yang telah memperjuangkan Agama Allah dan telah memenuhi dunia ini dengan ilmu pengetahuan dan menjalankan semua aturan sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berkat semua Nikmat dan Hidayah tersebut penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Implementasi Manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh”**.

Karya Ilmiah ini disusun dalam memenuhi dan merupakan suatu beban studi untuk melengkapi program sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis banyak mengalami kesukaran, keterbatasan kemampuan dan pengalaman menuju kesempurnaan karya ilmiah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Abdullah Amin (Alm) dan Ibunda Nursabitah yang sangat penulis cintai, kagumi dan banggakan. Mereka telah mendidik, menasehati dan memberikan dukungan moril dan materil yang tidak akan sanggup tergantikan serta ketulusan doa Ibunda yang selalu

menghiasi setiap shalatnya untuk kesuksesan dan keselamatan untuk penulis., sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Ar-Raniry dengan baik. Serta ucapan terima kasih kepada saudara dan saudari saya yang telah membantu dan mendukung selama masa pendidikan; *daklon* Ali Hasbi (Abang tertua) dan keluarga, *kaklon* Sardawati (kakak pertama) dan keluarga, dan *kaktek* Erdawati (kakak kedua) dan keluarga, serta kepada keponakan tercinta; Rahayu Sridadewi, Afdhalul Fauzi, Shulfa Nursukma, Dhaifunnas, Nada Fitria Ramadhani.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, terutama kepada dosen pembimbing skripsi yaitu Bapak Drs. Maimun Ibrahim, MA (pembimbing I) dan Ibu Sakdiah, S. Ag., M. Ag (pembimbing II), dan kepada seluruh dosen dan pegawai pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Terwujudnya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan Karyawan/ti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh; Bapak Mairul Hazami, SE.,M. Si (Kepala Dinas), Ibu Ida Friatna, M. Ag (Sekretaris), Bapak Ridwan, S. Ag., M. Pd (Kabid Dakwah), Ibu Hafisah, S. Pd.I (Kabid Pengembangan Syariah dan Dayah), Bapak Drs. A. Wahab, M. Si (Kabid Fardhu Kifayah), Bapak Bakhtiar, S. Ag., MH (Kabid Bina Ibadah dan Mu'amalah), serta terkhusus kepada kakak Nelli Mailani, S. HI (karyawati Bagian Umum serta mediator selama penelitian pada Dinas), serta kepada seluruh karyawan/ti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

Ucapan terimakasih juga kepada *maklang* Ir. Bukhari selaku orang yang berjasadalam memberikan rumah tempat tinggal selama kuliah di Banda Aceh,

kepada Sahabat dan teman-teman selama kuliah; Khaluka Ahsana Fitri (*enggy*), seluruh teman pada Unit 13 leting 2012 Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, sahabat-sahabatku (Saiful Azhar, Ahmad Tarmizi, Murtalib Umar, Muhammad Irfan, Meurah Adam, Irfan Jani, Zahriadi, Ahmadi (adek sepupu), Rahmat Mulia Akbar), serta kepada sahabat dan teman-teman lainnya. Semoga Allah SWT membalas semua jasa baik mereka.

Akhirnya, *Ridha*-Nya lah jua yang kita harapkan. Semoga skripsi ini dapat diterima, bermanfaat, dan dapat menyumbangkan nilai keilmuan dan kebaikan bagi semua insan, dan menjadikan tabungan amalan kebaikan tambahan *ukhrawi* khususnya bagi penulis dan pembaca, *amin ya rabbal 'aalamin*.

Banda Aceh, 09 Agustus 2016

Penulis,

Firman Syahputra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Implementasi	10
B. Manajemen	10
1. Pengertian Manajemen	10
2. Fungsi-Fungsi Manajemen	12
a. Perencanaan (<i>planning/takhthith</i>)	12
b. Pengorganisasian (<i>organizing</i>).....	14
c. Pelaksanaan atau Pergerakan (<i>Directing</i>)	17
d. Pengawasan dan Evaluasi	18
C. Dinas syariat islam Kota Banda Aceh	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Pendekatan dan Sumber Penelitian.....	20
B. Jenis Penelitian	20
C. Lokasi Penelitian/Objek Penelitian	21
D. Teknik Pengumpulan Data	21
E. Sumber data Penelitian	23
F. Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	24
1. Visi Misi	24
2. Profil dan Kiprah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	25
3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.....	27
4. Lokasi Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	37
5. Karyawan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	38
B. Hasil penelitian	38
1. Kiprah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	38
2. Program dan Kegiatan Renca (Rencana Kerja) Tahun 2016.....	47
3. Hasil Wawancara	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	57

BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|----------|--|
| Lampiran | 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh |
| Lampiran | 2. Daftar Nama Karyawan/ti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh |
| Lampiran | 3. Jumlah Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh berdasarkan Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jabatan |
| Lampiran | 4. Instrumen Wawancara kepada Karyawan/ti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh |
| Lampiran | 5. Instrumen Wawancara kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh |
| Lampiran | 6. Surat Keterangan (SK) Pembimbing Skripsi |
| Lampiran | 7. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi |
| Lampiran | 8. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi |
| Lampiran | 9. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh |
| Lampiran | 10. Foto Sidang Skripsi |

ABSTRAK

Dinas Syariat Kota Banda Aceh merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana di bidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syariat Islam memiliki tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Kota Banda Aceh mengenai pembangunan di bidang pelaksanaan Syariat Islam. Dalam mewujudkan tugas tersebut, maka tidak terlepas dari fungsi manajemen mulai tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi secara efektif dan efisien. Penelitian ini berjudul “Implementasi Manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh”, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen dan strategi dalam pengimplementasian manajemen secara efektif dan efisien, serta kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan manajemen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang berbentuk kualitatif. Sampel dalam penelitian ini ada 6 orang; Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang-bidang (Dakwah, Bina Ibadah dan Mu’amalah, Pengembangan Syari’ah dan Dayah, serta Fardhu Kifayah). Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, penelitian pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi manajemen belum diimplementasikan secara efektif dan efisien, terlihat dari adanya posisi jabatan yang kosong (pejabat fungsional, UPTD dan seksi bagian penertiban makam), ketidaksesuaian antara bidang profesi dengan jabatan dan proses pengawasan yang kurang objektif serta tidak adanya evaluasi hasil dari masyarakat. Secara keseluruhan, fungsi manajemen dijalankan melalui pengalaman, motivasi, pendekatan dan teladan. Pengimplementasian manajemen berdasarkan Tupoksi dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007. Adapun kendala dalam pengimplementasian manajemen yaitu kurangnya pegawai pada posisi jabatan dalam struktur organisasi dan tenaga profesional, serta dukungan dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: *implementasi, manajemen.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU Pemerintahan Aceh ini antara lain:

1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

¹ Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang: *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012 -2017*, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, No. 1

2. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
3. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
4. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
5. Implementasi formal penegakan syari'at Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.²

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh pada Bab V mengenai Urusan Pemerintahan Aceh pasal 16 yang menyebutkan bahwasannya urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Aceh, diantaranya: *pertama*, Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. *Kedua*, Perencanaan dan pengendalian pembangunan.³

²https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_khusus#cite_note-1. Diakses pada tanggal 14 Januari 2016

³Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Yayasan Mata Uroe Nanggroe), hal. 13-16

Semakin berkembang pesatnya lembaga pemerintahan maka semakin berkembang juga manajemen dalam suatu lembaga, termasuk lembaga-lembaga yang ada di Aceh. Dalam hal ini manajemen dapat diartikan sebagai pengelola, Sebagai pelaksana dari kegiatan manajemen. Kegiatan tersebut berusaha untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti manusia, uang dan mesin serta informasi. Kegiatan manajemen sebetulnya tidak hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, melainkan oleh kesatuan dari seluruh anggota organisasi.⁴ Namun demikian dalam kenyataannya hal tersebut dibatasi oleh unsur-unsur yang terdapat pada unsur-unsur manajemen itu sendiri, yaitu proses pembagian wewenang yang diikuti dengan tanggung jawab pada bidang masing-masing.

Penerapan seluruh fungsi-fungsi manajemen yang sesuai dengan aturan akan memberikan dampak yang sangat bagus dalam hal pencapaian tujuan sebuah lembaga maupun organisasi, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, Karena seluruh fungsi-fungsi yang terdapat dalam manajemen tersebut saling berkaitan dan saling menguatkan. Secara sederhana dapat disingkat dengan POAC. Yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengendalian.

Keberhasilan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan manajemen tidak terlepas dari peran seluruh unsur dalam manajemen, yaitu: Manusia (*man*), uang (*money*), metode (*methode*), alat/mesin (*machine*), dan waktu (*time*). Sering

⁴R. Matindas, *Manajemen SDM lewat Konsep AKU*, Cet. Kedua (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 1-3.

disingkat dengan 5M dan 1-T.⁵ Dari semua unsur manajemen tersebut, yang menjadi penggerak dalam proses pencapaian visi dan misi sebuah lembaga adalah manusia.

Pengelola dalam sebuah organisasi merupakan manajer sumber daya manusia dimana mereka memiliki tanggung jawab dalam berbagai langkah dan kegiatan manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan hingga tahap akhir dari pelaksanaan yang bertujuan mencapai tujuan sebuah lembaga ataupun organisasi.⁶

Oleh karena itu maka setiap organisasi/lembaga merupakan wadah bagi berlangsungnya aktivitas manajerial dalam rangka mencapai tujuan organisasi/lembaga secara efektif dan efisien. Setiap organisasi yang telah berkembang pesat tidak terlepas dari sistem manajemen yang baik diterapkan mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses evaluasi. Sebagai penanggungjawab sebuah organisasi, para manajer, direktur jenderal, sekretaris jenderal, kepala biro, kepala dinas Provinsi, kepala badan adalah orang-orang yang bertanggung jawab membuat perencanaan, mengambil keputusan, menyusun anggaran pembiayaan, menggerakkan, mengatur, memotivasi dan mengarahkan personil, menyusun standar hasil, membagi tugas, mengkomunikasikan program dan kebijakan, menyusun prosedur kerja dan

⁵Haryanto, *Rasulullah Way Of Managing People: Seni Mengelola Sumber Daya Manusia*, Cet. 1, (Jakarta: Khalifa, Pustaka Al-Kautsa, 2008), hal. 28

⁶Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ed. Ke 1, Cet. Ke 13 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 31-32.

⁷Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Cet. I, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal.17-18

mengawasi semua kegiatan organisasi/lembaga untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut.⁷

Dalam Qur'an surat Al-Ambiya' ayat 7 Allah SWT menjelaskan:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ^ط فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

“Kami tiada mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada Mengetahui.” (QS. Al-Ambiya' (21) Ayat 7)

Setiap organisasi/lembaga memiliki tujuan tertentu yang telah dirumuskan dengan baik yang tergambar dalam Visi dan Misi. Dimana antara keduanya memiliki hubungan yang erat dan saling menguatkan dikarenakan visi adalah tujuan akhir, dan misi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut.⁸ Maka dalam mewujudkan visi sangat memerlukan proses manajemen yang baik. Setiap proses dalam manajemen harus dijalankan sesuai fungsi yang ada pada manajemen, sehingga dapat menghasilkan *output* (hasil) yang baik juga.

Namun fenomena yang kita lihat sekarang, khususnya di Aceh, organisasi dan tata kelola Pemerintah Aceh masih belum maksimal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini terlihat dari adanya tumpang tindih tupoksi kelembagaan dan beban kerja instansi pemerintah yang belum seimbang. Tata kelola pemerintahan belum dilaksanakan secara baik yang tergambar dari belum efisien dan efektifnya penggunaan anggaran, distribusi aparatur yang tidak merata dan penempatan

⁷Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2013, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017*, Bab I; Ketentuan Umum, nomor 8-9, hal. 3

aparatur yang tidak sesuai dengan keahliannya, belum efisien dan efektifnya pelaksanaan tugas. Selanjutnya, sumber daya aparatur yang masih lemah, hal ini tergambar dari belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dinul Islam melalui penerapan Syari'at Islam di kalangan masyarakat Aceh masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat yang belum mencerminkan nilai-nilai keislaman. Dalam hal ini, implementasi Qanun Aceh yang berkaitan dengan pelaksanaan pokok-pokok syariat Islam dan dinul islam belum maksimal.¹⁰ Hal ini merupakan tanggung jawab dan telah tertera dalam tugas dan fungsi lembaga Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.¹¹

Kualitas manajemen belum maksimal diterapkan; fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan/pengendalian, serta evaluasi, baik dalam bidang Syariat Islam/Dinul Islam, pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan perlindungan belum memenuhi Standar Pelayanan Operasional (SPO). Hal ini tercantum pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2012.¹² Seiring dengan hal ini, Dinas yang bertanggungjawab dalam penegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

⁹ Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang: *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012 -2017*, hal. 194

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013: *RPJM Aceh 2012-2017, Bab IV; Permasalahan dan Tantangan Aceh*, hal. 194

¹¹ Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang: *Rencana Pembangunan Jangka Menengah...*, hal. 193

Jika dilihat dari segi kelembagaan, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh merupakan Perangkat Daerah yang memiliki struktur organisasi dan fungsi masing-masing bidang yang terstruktur, adanya Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Dakwah, Bidang Bina Ibadah dan Mu'amalah, Bidang Pengembangan Syari'ah dan Dayah, Bidang Fardhu Kifayah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Apabila semua struktur tersebut bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, maka seharusnya semua Qanun aceh yang menyangkut Syariat Islam bisa terealisasi dengan sangat baik. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sejalan.¹³

Seharusnya dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki serta ketersediaan dana yang memadai akan memberikan perubahan yang signifikan baik terhadap lembaga maupun program yang dilaksanakan sehingga sesuai dengan visi dan misi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dengan memaksimalkan semua fungsi manajemen sesuai prosedur yang telah ditetapkan.¹⁴

Berdasarkan masalah yang terjadi di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh di atas, khususnya pada pengimplementasian fungsi Manajemen, kondisi tersebut mendorong penulis ingin mengkaji masalah ini dengan judul: **“Implementasi Manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh”**

¹³Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2012; *tentang SOTK Dinas*

¹⁴Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang: *Rencana Pembangunan Jangka Menengah...*, hal. 246

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana strategidalam pengimplementasian manajemen secara efektif dan efisien pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mengenai arah dari penelitian ini, maka penyusun menentukan beberapa tujuan dari Penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi dalam pengimplementasian manajemen secara efektif dan efisien pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian secara teori adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai pengetahuan mengenai keharusan dalam mengimplementasikan manajemen.
2. Agar bisa menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa lainnya dalam melakukan penelitian pada objek dan variabel yang serupa.

Sedangkan manfaat penelitian secara praktis adalah:

1. Bagi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan dalam memaksimalkan sistem manajemen yang diterapkan
2. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi peneliti tentang manajemen dan cara pengimplementasiannya dalam suatu lembaga/organisasi.
3. Untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya Jurusan Manajemen Dakwah sebagai informasi baru tentang implementasi manajemen pada suatu lembaga pemerintahan; Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

1. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yakni *Implementation*, artinya pelaksanaan.¹⁵ Jika dilihat dari pengertian dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Implementasi mengandung arti pelaksanaan, penerapan.¹⁶

¹⁵Joyce M. Hawkins. *Kamus Dwibahasa Oxford Fajar Bakti*, (Kuala Lumpur, 1981), hal. 167

¹⁶Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 327

2. Manajemen adalah sebagaimana pendapat dari Terry mengatakan ada 4 hal yang menjadi fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).¹⁷
3. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Banda Aceh di bidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syariat Islam memiliki tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Kota Banda Aceh dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syariat Islam.¹⁸

¹⁷Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, cet. I, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 60

¹⁸Himpunan *Undang-Undang, Kepres, Keputusan Mahkamah Agung R.I, Perda/Qanun, Instruksi dan Edaran Gubernur, berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hal. 378-379.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan, penerapan.¹⁹ Menurut Guntur Setiawan pengertian dari implementasi atau pelaksanaan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Pengertian implementasi yang dikemukakan tersebut, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.²⁰

Dalam penelitian ini mengacu pada penerapan fungsi-fungsi manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi.

B. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kadarman dan Unaya bahwasannya manajemen adalah suatu rentetan langkah yang terpadu yang mengembangkan

¹⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 327

²⁰ <http://fatih-io.biz/pengertian-implementasi.html>. Di akses pada Tanggal 19 Januari 2016

suatu organisasi sebagai suatu sistem yang memiliki tiga sifat penting yaitu: sosio, ekonomis, dan teknis. Sosio adalah peran penting manusia dalam menggerakkan sistem dalam suatu lembaga/organisasi. Ekonomis berarti kegiatan dalam sistem organisasi yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan teknis berarti alat dan cara tertentu secara sistematis yang digunakan dalam kegiatan tersebut.²¹

Siagian juga menyebutkan ada 4 hal yang menjadi definisi dari manajemen. *Pertama*, penerapan teori manajemen harus tetap bersifat situasional, karena “seni” yang berperan dalam hal ini adalah untuk menggerakkan orang lain. *Kedua*, manajemen selalu berkaitan dengan organisasi; ada yang mengatur dan ada yang menjalankan. *Ketiga*, keberhasilan sebuah organisasi merupakan hasil dari kerjasama antara kemahiran manajerial pimpinan dan ketrampilan teknis pelaksana.²²

Terry menjelaskan tentang definisi manajemen yaitu: kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya.²³

Dalam pengertian lebih luas manajemen merupakan suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama semua pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi secara efektif dan efisien. Efisien adalah hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*)

²¹Tjandra Yoga Putra, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, edisi kedua, cet. ke-3 (Jakarta: UI-Press, 2003), hal. 15-16

²²*Ibid*, hal. 18-20

²³Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*,... hal. 41

dimana hasil yang dicapai lebih banyak daripada masukan (*input*) yang dikeluarkan. Sedangkan efektif adalah pencapaian aktifitas-aktifitas secara sempurna sesuai tujuan yang akan dicapai.²⁴

Dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien itulah suatu manajemen perlu menjalankan semua fungsi-fungsinya secara maksimal sebagaimana pendapat dari Terry mengatakan ada 4 hal yang menjadi fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).²⁵

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Aktivitas manajemen dimulai dari bagaimana menentukan arah organisasi di masa depan, menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi, mendorong terbinanya kerjasama antara sesama anggota organisasi, serta mengawasi kegiatan dalam mencapai tujuan.

Untuk penjelasan yang lebih terperinci dapat diuraikan pembahasan di bawah ini tentang fungsi pokok manajemen.

a. Perencanaan (*planning/takhtith*)

²⁴Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam ...*, hal. 42-43

²⁵*Ibid*, hal. 60

Perencanaan adalah *starting point* dari aktivitas manajemen. Disebabkan perencanaan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam memikirkan dan menyusun hal-hal yang diperlukan guna memperoleh hasil yang optimal.²⁶

Perencanaan merupakan tindakan awal dalam sebuah aktivitas manajerial dalam sebuah organisasi. Perencanaan merupakan pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya dalam mencapai tujuan. Hal ini dikarenakan didalam proses perencanaan akan ditentukan apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mewujudkannya dalam kenyataan sehingga tercapainya tujuan yang ditetapkan para manejer di setiap level manajemen.

Perencanaan berkaitan dengan tujuan (*means*) dan sasaran yang dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Terry bahwa ada tiga unsur pokok yang terdapat dalam perencanaan, yaitu: 1). Pengumpulan data, 2). Analisis fakta , 3). Penyusunan rencana yang kongkrit.

Johnson berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan perencanaan disusun berbagai visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran organisasi yang pada awal mengambil keputusan yang merupakan inti dari manajemen.

Sebuah perencanaan harus dapat menjawab lima pertanyaan pokok, sebagaimana yang diungkapkan oleh Siagian, yaitu:

1) Apa (*what*) yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang?

²⁶Maimun Ibrahim, et. al. *Pengantar Manajemen Dakwah*, cet. pertama,(Banda Aceh: Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, 2010), hal. 55

- 2) Siapa (*who*) yang akan bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut?
- 3) Bagaimana (*how*) mekanisme yang akan dilakukan dalam mencapai hal tersebut?
- 4) Adakah penjadwalan kegiatan yang jelas dan harus ditaati?
- 5) Dan kenapa semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan? Apa yang menjadi manfaat suatu kegiatan?.²⁷

b. Fungsi Pengorganisasi (*organizing*)

Sebagaimana yang dijelaskan Winadi bahwa Pengorganisasian mengandung pengertian yaitu suatu proses di mana pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen yang dapat ditangani dan aktivitas-aktivitas mengkoordinasikan hasil yang dicapai untuk mencapai tujuan.

Menurut Robbin yang mendefenisikan pengorganisasian sebagai suatu hal yang berkaitan dengan penetapan tugas-tugas untuk dikerjakan, siapa yang melakukannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokan, siapa yang melaporkan kepada siapa, dan dimana keputusan tersebut dibuat.

Dalam pengorganisasian mengandung beberapa konsep yaitu:

- 1) Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan aktivitas pekerjaan.
- 2) Wewenang adalah hak untuk memutuskan, mengarahkan orang-orang dalam melakukan suatu tindakan, atau untuk melaksanakan kewajiban dalam mencapai tujuan.

²⁷Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, cet. I, (Jakarta: Ciputat Press), hal. 59-64

- 3) Pendelegasian adalah proses pemberian tanggung jawab sepanjang yang dibutuhkan.
- 4) Pertanggung jawaban adalah jaminan bahwa seseorang yang diusulkan untuk melaksanakan tugas dalam kenyataan secara benar.
- 5) Struktur Organisasi adalah kerangka kerja organisasi.²⁸

Pengorganisasian segala sumber daya untuk mengoptimalkan kemampuan masing-masing pribadi hingga terwujud kerjasama dalam mencapai tujuan melalui pelaksanaan rencana. sejalan dengan hal itu, maka suatu pekerjaan harus diberikan kepada orang yang tepat.²⁹ Dalam hal ini Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang perintah untuk melaksanakan pengorganisasian.

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya: "Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya."(QS. Al-Isra' Surat ke 17, ayat 84)

Dalam menngoptimalkan manajemen secara benar dan tepat sasaran, maka fungsi pengorganisasian sangat menentukan keberhasilan fungsi perencanaan. Hal ini disebabkan pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk mempertimbangkan susunan organisasi, pembagian pekerjaan, prosedur pelaksanaan, pembagian tanggungjawab yang sesuai dengan kemampuan dan ketelitian dalam memilih orang-orang dalam suatu organisasi sehingga antara satu bidang dengan bidang lainnya dalam sebuah organisasi dapat bekerja sama dalam

²⁸Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, cet. I, (Jakarta: Ciputat Press), hal. 69-73

²⁹*Ibid*, hal. 189-190

upaya mewujudkan tujuan yang telah direncanakan.³⁰ Pengorganisasian juga merupakan suatu proses penetapan struktur peran, melalui penentuan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi dan bagian-bagiannya. Pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok-kelompok aktivitas kepada manajer-manajer, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya, pengoordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informasi, baik secara horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi.

Dalam hal keharusan menjalankan fungsi pengorganisasian ini, Allah SWT berfirman:

دُونِهِمْ مِنْ وَاٰخِرِيْنَ وَعَدُوْكُمْ اَللّٰهُ عَدُوْٓىٓ تَرْهٰبُوْنَ اَلْخَيْلِ رٰبٰطُوْنَ مِنْ قُوَّةٍ مِّنْ اَسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ وَاَعْدُوْا
 تَظْلَمُوْنَ لَا وَاَنْتُمْ اِلَيْكُمْ يُوفِّى اللّٰهُ سَبِيْلًا فِىْ شَيْءٍ مِّنْ تَنْفِقُوْا وَاَمَّا يَعْلَمُهُمَّ اَللّٰهُ تَعْلَمُوْنَ لَهُمْ لَا

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-Anfal ayat 60)

Dengan adanya pengorganisasian, maka akan memudahkan dalam mengatur kemampuan sumber daya insani untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien.³¹

Pengorganisasian memiliki dua aspek: *Pertama*: Struktur organisasi, yaitu susunan komponen-komponen (unit kerja) dalam organisasi. Ia menunjukkan

³⁰ Aep Kusnawan, dan Aep Sy. Firdaus, *Manajemen Pelatihan Dakwah*, cet. Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 98-101

³¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, ed. 1-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 91-92

adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi kegiatan yang berbeda tersebut diintegrasikan (koordinasi). *Kedua*, aspek perilaku. Karena struktur organisasi diisi oleh sejumlah orang maka terjadi proses perilaku. Proses perilaku tersebut, antara lain: komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, dan kepemimpinan.³²

Langkah-langkah dalam pengorganisasian (*thanzim*), yaitu:

- a) Mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan dalam kesatuan tertentu.
- b) Menentukan dan merumuskan tugas dari masing-masing kesatuan, serta menempatkan pelaksananya.
- c) Memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana.
- d) Menetapkan hubungan koordinasi.³³

c. Pelaksanaan atau Pergerakan (*Directing*)

Pelaksanaan atau pergerakan merupakan keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong anggota dalam sebuah organisasi agar mau dan ikhlas bekerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan ekonomis.³⁴

Pada tahapan pergerakan atau pelaksanaan dalam fungsi manajemen adalah kegiatan menjalankan konsep perencanaan dengan wadah dan struktur organisasi yang telah dibentuk dan disepakati oleh keseluruhan sumber daya manusia yang diajak dan ditunjuk keterlibatannya. Sejalan dengan hal ini,

³²Aep Kusnawan, dan Aep Sy. Firdaus, *Manajemen Pelatihan Dakwah...*, hal. 99

³³Maimun Ibrahim, et. al. *Pengantar Manajemen Dakwah...*, hal. 63

³⁴Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajeria*, ed. Revisi, cet. Kedua, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 95

menggerakkan, memberikan arahan, memimpin, dan memotivasi bertujuan agar perencanaan dan rancangan program dapat terlaksana secara efektif dan efisien. *Directing* atau menggerakkan unsur manusia dan material dalam fungsi ini lebih ditekankan pada bagaimana memimpin manusia secara efektif. Sehingga manusia yang dipimpin dapat menjalankan tugasnya masing-masing secara loyal dan senang.

Dalam hal ini, *directing* dalam fungsi manajemen dapat dibagi menjadi tiga elemen besar yaitu:

- 1) Mengadakan perintah atau instruksi.
- 2) Menyelenggarakan pemberian motivasi terhadap orang lain di lingkungan kerja.
- 3) Menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagi seluruh karyawan.³⁵

d. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan adalah tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. Karena pengawasan merupakan proses pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan juga akan menjamin standar bagi pencapaian tujuan. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa pengawasan merupakan usaha yang sistematis dalam menentukan apa yang telah dicapai yang

³⁵Muslich, *Bisnis Syari'ah: Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, cet. Pertama, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2007), hal.124-125

¹⁸*Ibid*, hal. 110-112

mengarah kepada penilaian kinerja dan pentingnya mengoreksi dan mengukur kinerja sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan dalam fungsi manajemen merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan terhadap *input* (jumlah dan kualitas bahan, uang, staf, peralatan, fasilitas, dan informasi), juga terhadap aktivitas (penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi), serta terhadap *output* (standar produk yang diinginkan).³⁶

Sedangkan evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap aktivitas dan kegiatan apakah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan digariskan.³⁷

C. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kota Banda Aceh di bidang pelaksanaan Syariat Islam; dan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota pada tingkat Kabupaten/Kota melalui SEKDA (Sekretaris Daerah).³⁸

³⁷Maimun Ibrahim, et. al. *Pengantar Manajemen Dakwah...*, hal. 73

³⁸Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang: *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Pasal 164

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu metode yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang masih sedikit orang yang mengetahui juga dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Disamping itu, metode kualitatif dapat memberi uraian yang kompleks tentang fenomena yang terjadi. Khususnya fenomena mengenai penerapan/implementasi fungsi-fungsi manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.³⁹

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berbentuk kualitatif. Pengertian kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai instrumen, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif. Mengarahkan sasaran penelitian deskripsi, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus memiliki perangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data,

³⁹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 4-5

rancangan penelitiannya bersifat sementara dalam hasil penelitian disepakati oleh kedua pihak, penelitian dan subjek penelitian.⁴⁰

C. Lokasi Penelitian / Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang menjadi tempat penelitian berlokasi di Jln. Soekarno-Hatta Km. 2 Mibo Kota Banda Aceh.⁴¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam upaya mendapatkan data yang diperlukan oleh peneliti untuk menjelaskan fenomena dalam penelitian ini yang mencakup data langsung dari informan dan data pendukung (sekunder). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Observasi* (pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan memperhatikan sesuatu berdasarkan pengamatan langsung melalui alat indera.⁴² *Observasi* juga sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah sederhana dapat diartikan sebagai

⁴⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi Revisi V, cet. 12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 11-12

⁴¹ Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2013), hal. 10.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM, 1997), hal. 56

proses dimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lapangan lokasi penelitian. Observasi juga dapat dipahami sebagai proses peran serta sebagai pengamat, artinya peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena.

2. Wawancara Mendalam (*deep interview*).

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara mendalam dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang Implementasi Manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

Adapun yang akan diwawancarai yaitu: Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Dakwah, Bidang Bina Ibadah dan Mu'amalah, Bidang Pengembangan Syari'ah dan Dayah, Bidang Fardhu Kifayah.⁴³

3. *Library Research* (Penelitian Pustaka)

Library Research adalah penelitian dengan menganalisa bahan-bahan yang bersifat ilmiah; data yang berkaitan dengan manajemen dan fungsi-fungsinya, implementasi, dan yang berhubungan dengan Dinas Syariat Islam.

4. *Dokumentasi*

⁴³ Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2013), hal. 4.

Dokumentasi adalah sebuah Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian yang bersumber dari tulisan, buku, jurnal, skripsi dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan teori dan permasalahan dalam penelitian. Serta Dokumen RPJM/RPJP Aceh tahun 2012-2017 dan Qanun Aceh yang berkenaan dengan judul penelitian, serta wawancara langsung dengan nara sumber/karyawan/karyawati dari Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, serta data-data yang tertulis yang diambil dari dokumen dan buku yang berhubungan dengan Dinas Syariat Islam mengenai gambaran umum lokasi penelitian, baik dokumen yang berhubungan dengan profil berdirinya, struktur organisasi, hasil kerja yang telah dicapai, dan cara kerjanya serta data lain yang sekiranya dibuat sebagai pelengkap dalam penelitian.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, maka dari itu yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah buku yang berkenaan dengan judul penelitian mengenai fungsi manajemen, dokumen dan informasi serta nara sumber/karyawan(i) pada kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJM/RPJP) Aceh Tahun 2012-2017 serta dokumen Qanun Aceh yang berkaitan dengan judul penelitian.

F. Teknis Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber penelitian kemudian dianalisa secara Deskriptif Analisis (penjelasan dan ulasan) sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Visi Misi

a. Visi Misi Pemerintah Kota Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki Visi, “ Banda Aceh Model Kota Madani.”

Sedangkan Misi yang akan dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Visi tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah*.
- 2) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
- 3) Memperkuat ekonomi kerakyatan.
- 4) Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- 5) Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami.
- 6) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak.
- 7) Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan.⁴⁴

b. Visi Misi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

⁴⁴ Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2013), hal. 1.

Untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Banda Aceh tersebut, maka Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memiliki Visi, “ Motivator Pencapaian Banda Aceh Model Kota Madani. ”

Adapun Misi yang akan dilakukan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Visi tersebut yaitu:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang profesional, amanah dan istiqamah.
- 2) Membangun kerjasama dengan *Stakeholder* dalam melaksanakan Syariat Islam.
- 3) Memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam penegakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.
- 4) Melakukan Dakwah dan Syiar secara berkelanjutan.
- 5) Melakukan pengembangan Syariah dan Dayah.
- 6) Membina dan menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk mengamalkan Syariat Islam secara sempurna.⁴⁵

2. Profil dan Kiprah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

a. Dasar Pembentukan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dibentuk dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Sejak tahun 2009, susunan organisasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh berubah, hal ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

⁴⁵ Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*,, hal. 2.

b. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dalam Qanun Aceh tersebut menjelaskan bahwasannya Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh adalah sebuah lembaga Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kota Banda Aceh di bidang pelaksanaan Syariat Islam, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Bina Ibadah dan Mu'amalah, Bidang Pengembangan Syari'ah dan Dayah, Bidang Dakwah, Bidang Fardhu Kifayah dan didukung oleh Sekretariat. Qanun Aceh tersebut menyatakan bahwasannya *Wilayatul Hisbah* (WH) yang sebelumnya bergabung dalam salah satu subdinas di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, maka sejak tahun 2009 dipisahkan dan digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, sedangkan Bidang Keluarga Berencana yang sebelumnya juga menjadi salah satu subdinas pada Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh juga bergabung pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.⁴⁶(lihat pada lampiran 2)

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syaria't Islam Kota Banda Aceh sesuai dengan Qanun Aceh tersebut adalah:

1. Kepala Dinas Syariat Islam
2. Sekretaris membawahi 3 Sub Bagian;
 - a. Sub Bagian Umum

⁴⁶Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013,*, hal. 4.

- b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang-Bidang;
- a. Bidang Bina Ibadah dan Muamalah, membawahi 3 Seksi;
 - 1) Seksi Bina Ibadah dan Haji
 - 2) Seksi Bina Muamalah dan Zakat
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Peribadatan
 - b. Bidang Dakwah, membawahi 3 Seksi;
 - 1) Seksi Bina ‘Aqidah
 - 2) Seksi Syi’ar Islam
 - 3) Seksi Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah
 - c. Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah, membawahi 3 Seksi;
 - 1) Seksi Bina Akhwal Hukum Keluarga
 - 2) Seksi Perundan-Undangan dan Hukum Islam
 - 3) Seksi Pengembangan Dayah
 - d. Bidang Fardhu Kifayah, membawahi 3 Seksi;
 - 1) Seksi Registrasi dan Perlengkapan
 - 2) Seksi Tahyiz dan Pemakaman
 - 3) Seksi Penertiban Makam.⁴⁷
3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bidang Pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

⁴⁷Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013,*, hal. 4.

a. Bidang Bina Ibadah dan Muamalah memiliki tugas:

- (1) Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Bina Ibadah dan Muamalah;
- (2) Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Binaibadah dan Muamalah;
- (3) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan urusan haji;
- (4) Pelaksanaan koordinasidan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Bina Ibadah dan Muamalah;
- (5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Bina Ibadah dan Muamalah;
- (6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- (7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

1) Seksi Bina Ibadah dan Haji mempunyai tugas:

- (a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Bina Ibadah dan Haji ;
- (b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Bina Ibadah dan Haji ;
- (c) Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan urusan haji;
- (d) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Bina Ibadah dan Haji ;

(e) melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Bidang Bina Ibadah dan Haji.

2) Seksi Bina Muamalah dan Zakat memiliki tugas dan fungsi (Tupoksi):

(a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Bina Mu'amalah dan Zakat

(b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Bina Mu'amalah dan Zakat

(c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Mu'amalah dan Zakat

(d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di Bidang Bina Muamalah dan Zakat

(e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

(f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ibadah dan Mu'amalah sesuai dengan tugasnya.

3) Seksi Sarana dan Prasarana Peribadatan yang memiliki tugas dan fungsinya, yaitu:

(a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Sarana dan Prasarana Peribadatan

(b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Sarana dan Prasarana Peribadatan

- (c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Sarana dan Prasarana Peribadatan
- (d) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di Bidang Sarana dan Prasarana Peribadatan
- (e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- (f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Ibadah dan Mu'amalah sesuai dengan tugasnya

b. Bidang Dakwah, menyelenggarakan tugas dan fungsi yaitu:

- (1) Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Dakwah
- (2) Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Dakwah
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Dakwah
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Dakwah
- (5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- (6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

1) Seksi Syiar Islam mempunyai tugas:

- (a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Syiar Islam

- (b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan teknis di Bidang Syiar Islam
- (c) Melaksanakan kegiatan Syiar Islam
- (d) Melestarikan nilai-nilai Islami/Syiar Islam
- (e) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Syiar Islam
- (f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Syiar Islam
- (g) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- (h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dakwah sesuai tugasnya.

2) Seksi Bina Aqidah mempunyai tugas:

- (a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Bina Aqidah
- (b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan teknis di Bidang Bina Aqidah
- (c) Melaksanakan pembinaan Aqidah bagi kalangan generasi muda
- (d) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Bina Aqidah

- (e) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Bina Aqidah
- (f) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- (g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dakwah sesuai tugasnya.

3) Seksi Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah yang mempunyai tugas:

- (a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah
- (b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan teknis di Bidang Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah
- (c) Melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam
- (d) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah
- (e) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah
- (f) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan

(g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dakwah sesuai tugasnya.

c. Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah menyelenggarakan fungsi:

(1) Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah

(2) Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah

(3) Pelaksanaan tugas pemberdayaan dayah, baik pembinaan santri, manajemen pengasuhan dan infrastruktur dayah

(4) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan pra rancangan Qanun dan produk hukum lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam

(5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah

(6) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah

(7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan

(8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

1) Seksi Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang memiliki tugas:

(a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Perundang-Undangan dan Hukum Islam

- (b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan teknis di Bidang Perundang-Undangan dan Hukum Islam
- (c) Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan pra rancangan Qanun dan produk hukum lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam
- (d) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Perundang-Undangan dan Hukum Islam
- (e) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Bidang Perundang-Undangan dan Hukum Islam
- (f) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- (g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah, sesuai tugasnya.⁴⁸

2) Seksi Bina Hukum Keluarga mempunyai tugas:

- (a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Bina Hukum Keluarga
- (b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan teknis di Bidang Bina Hukum Keluarga

⁴⁸Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013,*, hal. 8.

- (c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Bina Hukum Keluarga, melakukan penelitian dan pengembangan di Bidang Pelaksanaan Syariat Islam
- (d) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Bidang Bina Hukum Keluarga
- (e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- (f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah, sesuai tugasnya

3) Seksi Pengembangan Dayah mempunyai tugas:

- (a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pengembangan Dayah
- (b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan teknis di Bidang Pengembangan Dayah
- (c) Melaksanakan tugas pemberdayaan Dayah, baik pembinaan santri, manajemen pengasuhan dan infrastruktur Dayah
- (d) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Pengembangan Dayah
- (e) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pengembangan Dayah

- (f) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- (g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah, sesuai tugasnya.⁴⁹

d. Bidang Fardhu Kifayah menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Fardhu Kifayah
- b) Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Fardhu Kifayah
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Fardhu Kifayah
- d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Fardhu Kifayah
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

1) Seksi Registrasi dan perlengkapan mempunyai tugas:

- (a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Registrasi dan perlengkapan

⁴⁹ Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*,, hal. 8-9

- (b) Menyiapkan program pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Registrasi dan perlengkapan
- (c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Registrasi dan perlengkapan
- (d) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Bidang Registrasi dan perlengkapan
- (e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- (f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.⁵⁰

2) Seksi Tahyihiz Mayit dan Pemakaman mempunyai tugas:

- (a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Tahyihiz Mayit dan Pemakaman
- (b) Menyiapkan program pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Tahyihiz Mayit dan Pemakaman
- (c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Tahyihiz Mayit dan Pemakaman
- (d) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Bidang Tahyihiz Mayit dan Pemakaman
- (e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan

⁵⁰ Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*,, hal. 9-10

(f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fardhu Kifayah sesuai tugas dan fungsinya

3) Seksi Penertiban Makam mempunyai tugas:

(a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Penertiban Makam

(b) Menyiapkan program pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Tahyiz Mayit dan Pemakaman

(c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Penertiban Makam

(d) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Bidang Penertiban Makam

(e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan

(f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fardhu Kifayah sesuai tugas dan fungsinya.⁵¹

4. Lokasi Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sejak tanggal 1 Agustus 2007 menempati kantor di Jln. Soekarno-Hatta Km. 2 Mibo Kota Banda Aceh yang

⁵¹ Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013,*, hal. 10.

dibangun oleh BRR. Sebelumnya Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Bertempat di Ruko Jalan T. Iskandar Beurawe Kota Banda Aceh.⁵²

5. Karyawan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Karyawan/ti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tahun 2016 adalah 43 orang dengan rincian; golongan III/d sebanyak 13 orang, golongan III/c sebanyak 9 orang. Rincian pegawai berdasarkan jabatan/*eselonering*; Kepala dan Sekretaris masing-masing 1 orang, Kasubbag 3 orang, Kabid 4 orang, dan Kasie 12 orang. Sedangkan jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan dengan rincian; Strata Satu (S-1) sebanyak 13 orang, SLTA sebanyak 8 orang, dan Strata Dua (S-2) sebanyak 7 orang.⁵³(untuk lebih jelas lihat pada lampiran 3)

B. Hasil Penelitian

1. Kiprah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan Syariat Islam yang meliputi aspek Aqidah, Ibadah, Muamalah dan Akhlak, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan Qanun-qanun dan atau peraturan perundang-undangan lainnya di Dinas Syariat Islam, serta kewenangan melakukan tindakan *preventif* (pencegahan)

⁵²Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*,....., hal. 10.

⁵³Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*, hal. 12.

terhadap pelanggaran Syariat Islam yang telah diterapkan disertai dengan Qanunnya.⁵⁴

Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam upaya mendukung dan mewujudkan Visi Misinya dan Visi Misi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya menjadikan Kota Banda Aceh sebagai Model Kota Madani. Hal ini sejalan dengan dukungan yang diberikan dari anggaran yang bersumber dari APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kota) dan APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) yaitu Otonomi Khusus/Minyak dan Gas. Namun sebagian kegiatan dilaksanakan tanpa adanya anggaran khusus. Semua itu dilakukan dalam rangka mewujudkan visi misi Kota Banda Aceh sebagai Kota Madani.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh terhadap pelaksanaan Syariat Islam dan pembinaan ke arah pengembangan Syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah:

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam meliputi:

(a) Sosialisasi Qanun Syariat Islam

Sosialisasi Qanun Syariat Islam dilaksanakan dalam bentuk kajian Agama Islam bagi pejabat Pemerintah Kota Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pejabat Pemerintah Kota Banda Aceh dan masyarakat mengenai ajaran Islam. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka

⁵⁴ Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*,, hal. 10-13

memperkenalkan Qanun-qanun Syariat Islam kepada masyarakat dan juga sebagai upaya menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* di wilayah Kota Banda Aceh khususnya dan Aceh secara umum.

(b) Pemberdayaan *Meunasah* dan *Balee Seumeubeut* (tempat pengajian)

Kegiatan Pemberdayaan *Meunasah* dan *Balee Seumeubeut* (tempat pengajian) dilaksanakan melalui 3 bentuk kegiatan, yaitu:

- (a) Kegiatan Operasional TPA dan Balai Pengajian
- (b) Kegiatan kajian tentang *Tadabbarul Quran* menurut Rasulullah SAW
- (c) Pengadaan Mushaf Al-Quran.

Pemberdayaan *Meunasah* dan TPA atau *Balee Seumeubeut* dilakukan dengan melaksanakan pelatihan metode Iqra' untuk guru-guru TPA dan memberikan bantuan operasional untuk TPA atau *Balee Seumeubeut*-Kota Banda Aceh.

Sedangkan kajian tentang *tadabbarul Quran* dilaksanakan di balai pengajian untuk orang dewasa di 50 gampong dalam Kota Banda Aceh sekaligus penyaluran *Mushaf Al-Quran*.

Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai kandungan Al-Quran, peningkatan fungsi sarana ibadah dalam

pembinaan agama umat, serta peningkatan kualitas TPA/Balai Pengajian sebagai wadah untuk mencetak generasi Qur'ani.⁵⁵

(c) Operasional Pengawasan Terpadu

Operasional Pengawasan Terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, meliputi:

- ii. Biaya Operasional Tim Pembina *Muhtasib*(penegak Syariat Islam) Gampong
- iii. Biaya Operasional Tim Pembina Da'i Perkotaan
- iv. Biaya Operasional dan Pengawasan bagi Tenaga *Muhtasib*(penegak Syariat Islam) Gampong
- v. Biaya Operasional Tenaga Da'i Perrkotaan

Kegiatan Operasional Pengawasan Terpadu dilakukan dalam bentuk penyerahan biaya operasional pengawasan *Muhtasib* (penegak Syariat Islam) Gampong sebanyak 48 orang di 48 Gampong. Biaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja *Muhtasib* Gampong dalam melakukan tugas pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di Gampong-gampong. Tujuannya adalah agar para *Muhtasib* Gampong dapat menjadi *Pageu* Gampong dan meminimalisir pelanggaran

⁵⁵ Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*,, hal. 14.

Syariat Islam pada tingkat Gampong dan wilayah Kota Banda Aceh. Biaya Operasional tersebut juga diberikan kepada Da'i Perkotaan yaitu sebanyak 27 orang, dengan harapan agar kinerja para Da'i Perkotaan semakin baik dan kegiatan dakwah di Kota Banda Aceh dapat terus ditingkatkan serta pelanggaran terhadap Qanun-qanun Syariat Islam dapat diminimalisir, baik di Gampong-gampong, tempat-tempat wisata serta wilayah Kota Banda Aceh secara keseluruhan.⁵⁶

2) Program penelitian dan Pengembangan Syariat Islam

Program penelitian dan Pengembangan Syariat Islam ini meliputi 2 hal, yaitu:

- (a) Penerbitan jurnal, *workshop*, kajian dan seminar
- (b) Bimbingan Hukum Keluarga (*Akhwalusy Syakhsiyah*) dan Pembinaan Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*.

Program penelitian dan Pengembangan Syariat dilaksanakan melalui penerbitan Tabloid Jum'atan (Tabloid Banda Aceh Madani), kajian tentang Ilmu Ushuluddin dan Kegiatan *Ta'lim Tarikh* Islam. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk peningkatan pemahaman agama, penguatan aqidah dan peningkatan syi'ar dan publikasi Syariat Islam kepada masyarakat Kota Banda Aceh.

Kajian Ilmu Ushuluddin dilaksanakan pada 9 Masjid di lingkungan Kota Banda Aceh, sedangkan Kegiatan *Ta'lim Tarikh* Islam dilakukan dengan mengirim para penceramah ke seluruh Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh, yaitu

⁵⁶ Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*,, hal. 14

berjumlah 90 Gampong. Tabloid Banda Aceh Madani terbit 2 (edisi) di akhir tahun 2012. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, juga dilaksanakan kegiatan Bimbingan Hukum Keluarga (*Akhwalusy Syakhsiyah*) dan Pembinaan Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* yang diikuti para tokoh agama dan masyarakat Gampong. Setelah dibimbing dan dibina, para tokoh agama dan masyarakat Gampong tersebut diharapkan dapat mensosialisasikan dan memberikan bimbingan kepada calon mempelai agar dapat membina rumah tangga mereka sehingga terwujud keluarga bahagia, santun, dan saling menyayangi dan bertaqwa kepada Allah SWT. Disamping itu para tokoh agama dan masyarakat dituntut agar bisa menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi di kalangan masyarakat Gampong mereka.⁵⁷

3) Program Penyemarakan Syiar Islam

Penyemarakan Syi'ar Islam di Kota Banda Aceh dilakukan dengan metode Komunikasi dan Publikasi; sosialisasi dengan menggunakan mobil operasional, ceramah ke Gampong-gampong, sosialisasi melalui media cetak, media elektronik (Televi dan Radio), dan *billboard*. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan Qanun-qanun tentang Syariat Islam dan dalam upaya menegakkan '*amar ma;ruf nahi mungkar* di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.⁵⁸

4) Program Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Ibadah

⁵⁷ Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*,, hal. 15-16.

⁵⁸ *Ibid*,, hal. 16

Program Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Ibadah dilaksanakan melalui Pembinaan Manajemen Sarana Ibadah. Kegiatan tersebut diwujudkan dengan melakukan lomba kebersihan dan ketertiban Masjid se-Kota Banda Aceh, selain itu juga menyalurkan intensif Imam Masjid, Imam Gampong dan Imam Mushalla yang bersumber dari dana Otsus dan Migas. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan jama'ah di Masjid, peningkatan peran para Imam serta peningkatan kebersihan tempat ibadah dalam wilayah Kota Banda Aceh.

5) Program Bimbingan Ibadah

Program Bimbingan Ibadah meliputi dua kegiatan yaitu:

- (a) Pembinaan pendidikan dan Pengajian Masyarakat
- (b) Bimbingan Pengajian Al-Quran dan LPTQ

Kegiatan Pembinaan Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat serta Bimbingan Pengajian Al-Quran dan LPTQ diwujudkan dengan penyelenggaraan Majelis *Ta'lim* (50 *Balee* Pengajian), Pembentukan Kelompok Tahfiz di 20 Masjid dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Khataman Al-Quran. Hal ini bertujuan agar semakin tumbuh dan meningkatnya rasa cinta generasi penerus bangsa terhadap Al-Quran serta lahirnya hafizh-hafizh Al-Quran di Kota Banda Aceh.⁵⁹

6) Program Pembinaan Aqidah Ummat

⁵⁹Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*,, hal. 16-17.

Program Pembinaan Aqidah Ummat dilakukan dalam dua kegiatan, yaitu:

- (a) Peningkatan Pemahaman Aqidah bagi masyarakat
- (b) Penangkalan Usaha Pendangkalan Aqidah

Kedua hal tersebut diupayakan dengan berbagai kegiatan antara lain; Kajian tentang *Ululhiyyah* (ketauhidan), Kajian Tafsir Ayat-ayat Hukum, Kegiatan Hafalan Juz ‘Amma, kegiatan *Amar Ma’ruf Nahi Mungkar* dan pengadaan Kitab Ilmu Kalam dan Tauhid serta Kitab Tafsir.

7) Program Penyuluhan Agama Islam dan Sosialisasi Qanun

Program Penyuluhan Agama Islam dan Sosialisasi Qanun dilakukan melalui Pembinaan Dayah, TPA dan Balai Pengajian. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan bersinergi dengan lembaga-lembaga lain terutama lembaga yang bergerak dalam pembinaan dan pengembangan Dayah, Taman Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ), dan Balai Pengajian. Hal ini bertujuan agar lembaga pendidikan semakin kuat dan profesional dan dapat membentengi ummat dari faham-faham yang menyesatkan.⁶⁰

Banda Aceh merupakan sebuah kota dengan masyarakatnya yang heterogen dan menghadapi banyak problema dalam berbagai bidang, misalnya; munculnya aliran sesat, pendangkalan Aqidah, Pemurtadan, Komunitas Anak PUNK, *Trafiking* anak, Prilaku amoral dan prolema lainnya.

⁶⁰*Ibid*,..., hal. 17.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penguatan generasi muda, anak-anak yang senantiasa mendapatkan bimbingan dan pembinaan spritual. Dayah, TPA dan Balai Pengajian merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai kapasitas dalam bidang tersebut. Untuk menjaga agar lembaga-lembaga pendidikan tersebut tetap berjalan dengan baik maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk pembinaan lembaga-lembaga tersebut setiap tahunnya.

Kegiatan Pembinaan Dayah, TPA dan Balai pengajian dilakukan dengan melaksanakan *workshop* Manajemen TPA/Balai Pengajian, Pelatihan Metode Iqra' untuk guru-guru TPA seluruh Banda Aceh, mengunjungi Dayah-dayah serta memberikan bantuan operasional untuk Dayah, TPA/Balai Pengajian. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Direktur/Pimpinan Dayah, TPA/Balai Pengajian tentang Manajemen yang baik dan profesional serta meningkatkan kualitas Dayah, TPA/Balai Pengajian sebagai wadah pencetak generasi muda.⁶¹

8) Program Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam

Program Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam dilaksanakan melalui Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Koordinasi (Rakor). Pelaksanaan Raker dan Rakor ini diikuti oleh tokoh agama dan *stakeholder* dengan tujuan agar tersusunya

⁶¹ Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*,, hal. 18

Program Kerja Dinas Syariat Islam yang berkualitas, tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Banda Aceh.

9) Program Pembinaan Fardhu Kifayah.⁶²

Program Pembinaan Fardhu Kifayah dilakukan melalui Pembinaan Penyelenggaraan Tajhiz Mayat yang dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Tenaga Tajhiz Mayat dan penyaluran dana insentif untuk petugas tajhiz mayat pada 90 Gampong dalam 9 Kecamatan (diwakili 2 orang per Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh dengan dukungan dana APBK Kota Banda Aceh. Selain kegiatan tersebut juga dilakukan Pendataan Makam di Gampong dengan tujuan agar tersedianya data jumlah makam dan mengevaluasi kebutuhan akan lahan pemakaman bagi warga Kota Banda Aceh. Selain kegiatan tersebut, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh juga membentuk Tim *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* (TAMAR) di tingkat Kota Banda Aceh dan di tingkat Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh. TAMAR juga diberi tugas untuk melakukan pengawasan ke beberapa tempat yang rawan akan pelanggaran Syariat Islam.⁶³

2. Program dan Kegiatan Renja (Rencana Kerja) Tahun 2016.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

⁶²*Ibid*,..., hal. 19.

⁶³Mairul Hazami, dkk, *Syariat Islam Dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*, ..., hal. 18-19.

²¹Hasil Wawancara dengan Bapak Mairul Hazami, SE., M. Si., (Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), Rabu tanggal 20 Juli 2016

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 6) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 7) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - 8) Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
 - 9) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
 - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; yaitu pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam
- 1) Sosialisasi Qanun Syariat Islam

- 2) Operasional Pengawasan Terpadu
 - 3) Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amalan Umat Islam
 - 4) Penguatan Lembaga Dakwah Sekolah (LDS)
 - 5) Pembinaan Hafizh dan Hafizhah
 - 6) Pembinaan Kelembagaan LPTQ Kota Banda Aceh
 - 7) Pembinaan Gampong Syariah
- e. Program Penelitian dan Pengembangan Syariat Islam
- 1) Bimbingan Hukum Keluarga (*Ahwalusy Syakhsiyah*) dan Pembinaan Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah
 - 2) Peningkatan Publikasi melalui Media Elektronik dan Media Cetak
 - 3) Penyusunan Standar Operasional Penerapan Syariat Islam
- f. Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah
- 1) Pembinaan Kader Dakwah
 - 2) Dakwah Umum Jum'atan
- g. Program Pemberdayaan Sarana Ibadah
- 1) Pembinaan Manajemen Sarana Ibadah
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah
- h. Program Pembinaan Aqidah Ummat, yaitu Pembinaan Muallaf
- i. Program Penyuluhan Agama Islam dan Sosialisasi Qanun, yaitu Penyuluhan hukum Islam dan Isi Qanun
- j. Program Pembinaan Fardhu Kifayah
- 1) Pembinaan Penyelenggaraan Tajhiz Mayit

2) Pembinaan Pembekalan Ilmu Tauhid

- k. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah, yaitu Pendukung pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ).⁶⁴

3. Hasil Wawancara

a. Kepala Dinas

Manajemen yang diterapkan oleh Bapak Mairul Hazami sebagai Kepala Dinas pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh adalah Manajemen secara umum; mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, maka semua tahapan manajemen tersebut harus diterapkan melalui motivasi kepada karyawan, keteladan, penghargaan, dan sanksi (*punishment*). Hal tersebut merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja baik Kepala Dinas maupun karyawan/ti.⁶⁵

Bapak Mairul Hazami menambahkan tentang memotivasi karyawan, beliau menganalogikan dengan kata “timses” yaitu Tim Sukses dalam sebuah pemilihan. Timses tersebut bertugas memperkenalkan calon yang akan dipilih dengan para calon pemilih, dan Timses yang sukses akan diberikan imbalan oleh calon yang pilih. Analogi tersebut disamakan dengan “Timses Allah SWT” dalam arti

⁶⁴ Program dan Kegiatan Renca (Rencana Kerja) Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tahun 2016.

memperkenalkan Allah SWT sebagai Pencipta dan Yang Memiliki kekuasaan mutlak kepada hamba-Nya melalui semua aturan yang dibuat oleh pemerintah; Undang-undang ataupun Qanun Syariat Islam. Apabila para “Timses Allah SWT” tersebut sukses dalam pekerjaan mereka, maka *Ridha* Allah dan balasan di akhirat yang diharapkan semata.⁶⁶

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mairul Hazami dalam Proses perencanaan yang diterapkan pada Dinas Syariat Islam selama kepemimpinan beliau adalah melalui beberapa tahapan, *pertama*: menerima masukan dari masyarakat yang peduli Syariat, Masjid-masjid, Lembaga-lembaga pemerintahan terkait, serta Organisasi Masyarakat (Ormas). *Kedua*: menampung masukan tersebut melalui Musyawarah tingkat Desa, Musyawarah tingkat Kecamatan, dan ditampung pada SKPK (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Bappeda. Semua usulan tersebut disesuaikan dengan anggaran dan Tupoksi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dengan mengedepankan sistem musyawarah sesuai aturan Islam yang mengharuskan untuk melakukan musyawarah dalam membuat dan mengambil keputusan.⁶⁷

Setelah melaksanakan tahapan perencanaan, maka hal selanjutnya adalah tahapan pengorganisasian. Perekrutan dan pembagian tugas tidak dilakukan pada Dinas Syariat Islam, namun dilakukan oleh Wali Kota melalui SKPP (Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Mairul Hazami, SE., M. Si., (Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), Rabu tanggal 20 Juli 2016.

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Mairul Hazami, SE., M. Si., (Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), Rabu tanggal 20 Juli 2016.

Strategi yang dilakukan oleh Bapak Mairul Hazami dalam mencapai visi misi Dinas Syariat Islam adalah melalui keteladanan, pendekatan kepada karyawan diiringi dengan *reward* (hadiah) dan *punishment* (hukuman/sanksi).⁶⁸

Keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tergantung pada *animodari* masyarakat dalam mengikuti kegiatan, dan keberhasilan semua kegiatan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung yaitu SDM (sumber daya manusia), dan anggaran serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Sedangkan Kendala dalam melaksanakan kegiatan adalah partisipasi dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan; menghadiri ceramah dan dakwah islami. Sistem pengawasan dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat Ketua Seksi terhadap staf, Ketua Bidang terhadap Kepala-kepala Seksi, Kepala Dinas terhadap Kepala Bidang, dan pengawasan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yaitu Wali Kota Banda Aceh terhadap Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.⁶⁹

Hal yang dilakukan Bapak Mairul Hazami dalam menyatukan visi misi lembaga dengan pegawai adalah dengan cara melibatkan semua Bidang dalam melaksanakan tugas pada Bidang tertentu sehingga terjalinnya sikap saling tolong menolong antara Bidang-bidang tersebut.⁷⁰

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Mairul Hazami , SE., M. Si., (Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), Rabu tanggal 20 Juli 2016.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mairul Hazami , SE., M. Si., (Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), Rabu tanggal 20 Juli 2016.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Mairul Hazami , SE., M. Si., (Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), Rabu tanggal 20 Juli 2016

b. Sekretaris

Ibu Ida Friatna menjelaskan tentang Sistem Perencanaan yang dilakukan dalam proses penyusunan. Sistem Perencanaan dilakukan pada masing-masing bagian seksi; Seksi Keuangan, Seksi Bagian Umum dan Seksi Bagian Kepegawaian. Setiap seksi menjalankan program sesuai Tugas dan Fungsi masing-masing melalui koordinasi kepada keuangan dan Kepala Sekretaris. Fungsi utama pada Bidang Sekretariat adalah sebagai pembuat program pada tingkat Dinas Syariat Islam melalui pengumpulan rencana program dari seluruh bidang-bidang dan dijadikan sebagai program Dinas dan disesuaikan dengan anggaran pada tingkat Kota Banda Aceh.⁷¹

Perencanaan tersebut sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu:

- (a) Musyawarah pada tingkat Desa
- (b) Musyawarah pada tingkat Kecamatan
- (c) Musyawarah pada tingkat Kabupaten/Kota
- (d) Musrena (Musyawarah Rencana Aksi Wanita)
- (e) Forum SKPK (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- (f) Diinput oleh SKPK Dinas
- (g) Pra RKA (Rencana Kegiatan Anggaran)
- (h) RKA (Rencana Kegiatan Anggaran)

⁷¹Hasil Wawancara dengan Ibu Ida Friatna, M.Ag., (Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), Selasa tanggal 19 Juli 2016.

(i) DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).⁷²

c. Bidang Dakwah

Bapak Ridwan selaku Kepala Bagian Dakwah menjelaskan mengenai sistem perencanaan yang dilakukan pada Bidang Dakwah berdasarkan Musrembang tingkat Desa, Kecamatan dan Kota sesuai kebutuhan masyarakat, dan mengacu pada RKA (Rancangan Kegiatan Anggaran yang akan dibahas pada tingkat Kota yaitu Kelompok Kerja (pokja), serta disahkan oleh DPR Aceh. Fungsi Bidang Dakwah dalam penyusunan program Dinas adalah sebagai pihak yang mengusulkan dan meyakinkan melalui data-data yang tertulis.⁷³

Sistem perekrutan dan pembagian tugas telah ditetapkan pada tingkat Kabupaten/Kota melalui BKPP. Semua Bidang yang ada pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. Walaupun demikian, hal ini sesuai antara profesi Kepala Bidang Dakwah yaitu Sarjana lulusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan jabatan pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Bapak Ridwan menambahkan bahwasannya Bidang Dakwah sangat berperan dalam penyusunan program disebabkan 2 fungsi yang sangat strategis; yaitu sebagai pihak yang menyampaikan

⁷² Hasil Wawancara dengan Ibu Ida Friatna, M.Ag., (Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), Selasa tanggal 19 Juli 2016.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan, S.Ag., M.Ag., (Kepala Bidang Dakwah pada Dinas Syariat Islam), Kamis Tanggal 14 Juli 2016.

aturan-aturan pemerintah dan sebagai penyerap tanggapan dan respon dari masyarakat.⁷⁴

Proses pengawasan yang dilakukan secara bertingkat, mulai pengawasan dari Kepala Dinas terhadap Kepala-kepala Bidang, selanjutnya Kepala Bidang Mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi stafnya. Selain itu, para karyawan/ti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh diawasi melalui sistem *online*, yaitu *Elektronik Kinerja* (E-Kinerja). Sedangkan evaluasi dilakukan melalui Rapat Rutin Mingguan yang dilaksanakan pada tiap hari Selasa, serta laporan tahunan melalui laporan kegiatan tertulis.⁷⁵

d. Kepala Bidang Fardhu Kifayah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A. Wahab selaku Kepala Bidang Fardhu Kifayah menyebutkan tentang Sistem perencanaan yang dilakukan melalui Tupoksi masing-masing Bidang yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian tugas berdasarkan Kepala Seksi yang ada pada Bidang Fardhu Kifayah, yaitu Seksi Bagian Registrasi dan Perlengkapan, Seksi Tajhiz dan Pemakaman, serta Seksi Penertiban Makam. Dalam pembagian tugas, Bidang Fardhu Kifayah mengalami kendala mengenai adanya Jabatan yang kosong yaitu pada Seksi Penertiban Makam. Model pengawasan yang dilakukan pada Bidang Fardhu Kifayah melalui pengamatan

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan, S.Ag., M.Ag., (Kepala Bidang Dakwah pada Dinas Syariat Islam), Kamis Tanggal 14 Juli 2016

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan, S.Ag., M.Ag., (Kepala Bidang Dakwah pada Dinas Syariat Islam), Kamis Tanggal 14 Juli 2016.

langsung dan E-Kinerja (*electronic* Kinerja) pada tiap hari yang dilaporkan melalui pengisian secara *online*. Sedangkan pengevaluasian kegiatan dilakukan melalui koordinasi pada Bidang Fardhu Kifayah dan Rapat Rutin mingguan pada hari selasa.⁷⁶

e. Kepala Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah

Ibu Hafsah selaku Kepala Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah mengatakan bahwa Perencanaan program yang dilaksanakan melalui program yang dibebankan pada Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah yang tercantum dalam Tupoksi, dan perencanaan dilaksanakan pada awal tahun untuk program yang akan dilaksanakan kemudian Tupoksi tersebut dibagi kepada masing-masing Kasi (Kepala Seksi Dayah, Undang-undang dan Hukum Keluarga).⁷⁷

Hal yang sangat urgen terhadap keberadaan Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah adalah sebagai pembantu dalam menyebarkan dakwah kepada masyarakat melalui dakwah Jum'atan, kuliah umum, seminar, media cetak; Tabloid Madani, membina Kelompok Tahfiz, memfasilitasi para Tahfiz dan kelompok *Qiyamul Lail* pada Bulan Ramadhan dengan mendatangkan Syekh dari Timur Tengah.⁷⁸

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Bapak DRS. A. Wahab, M.Si., (Kepala Bidang Fardhu Kifayah pada Dinas Syariat Islam), Kamis Tanggal 14 Juli 2016.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Hafsah, S.Pd.I (Kepala Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah pada Dinas Syariat Islam), Kamis Tanggal 14 Juli 2016.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Hafsah, S.Pd.I (Kepala Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah pada Dinas Syariat Islam), Kamis Tanggal 14 Juli 2016.

Pada saat ditanyai tentang kesesuaian antara profesi dengan jabatan, Ibu Hafsa mengatakan, ”kami bekerja secara efisien dan efektif serta siap bekerja berdasarkan pengalaman”. Dalam pelaksanaan program yang tercantum dalam Tupoksi, maka pengawasan sangat diperlukan agar dapat mencapai visi misi Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh. Pengawasan yang dilakukan secara langsung kepada Kepala Seksi dan selanjutnya terhadap staf oleh Kepala Seksi. Selanjutnya evaluasi yang dilakukan melalui Rapat Rutin Mingguan pada tiap hari Selasa.⁷⁹

f. Kepala Bidang Bina Ibadah dan Mu’amalah

Sistem Manajemen dilakukan pada Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah melalui komunikasi dalam rapat, misalnya rapat mingguan yang diadakan pada tiap hari Selasa pagi. Perencanaan program dilakukan sesuai sistem rencana anggaran yang rencanakan pada tahun sebelumnya. Program tahunan yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya direncanakan pada tahun sebelumnya, mulai dari awal tahun sesuai dengan kalender kegiatan.⁸⁰

Sistem pembagian tugas terdiri dari dua tingkatan; *pertama*: pembagian tugas secara umum yaitu pembagian tugas pada tingkat Bidang-bidang sesuai tugas dan fungsi. *Kedua*: pembagian tugas secara khusus dilakukan pada tingkat kepala seksi yang ada pada Bidang Bagian, misalkan pada Bina Ibadah dan Mu’amalah yang

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Hafsa, S.Pd.I (Kepala Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah pada Dinas Syariah Islam), Kamis Tanggal 14 Juli 2016.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Bakhtiar, S.Ag., M. H., (Kepala Bidang Ibadah dan Mu’amalah), hari Jumat tanggal 15 Juli 2016.

terdiri dari 3 seksi; seksi Bina Mu'amalah dan Zakat, seksi Bina Ibadah dan Haji, dan Seksi Sarana dan Prasarana Ibadah. Masing-masing seksi terdiri dari Kepala Seksi dan satu (1) orang staf.⁸¹

Bapak Bakhtiar menanggapi tentang kesesuaian antara Bidang Profesi dengan jabatan, bahwa seharusnya ada kesesuaian antara Bidang Profesi dengan Jabatan agar informasi yang disampaikan sama. Namun hal tersebut tidak menjadi tolak ukur dalam memberikan jabatan, disebabkan kita berhadapan dengan masyarakat dan lebih memperhatikan berdasarkan pengalaman dan kemampuan seseorang secara personal.⁸² Pada tahap pelaksanaan program, seluruh Bidang diberi tanggung jawab sesuai Tupoksi misalnya pada acara MTQ tingkat Kota Banda Aceh, maka Bidang Pengembangan Syari'ah dan Dayah bertindak sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).⁸³

Evaluasi kegiatan dilaksanakan bertahap mulai evaluasi tingkat seksi oleh Kepala Bidang, selanjutnya tingkat Bidang-bidang dievaluasi Kepala Dinas dan pada tingkatan Dinas dievaluasi oleh Wali Kota Banda Aceh melalui laporan kegiatan.⁸⁴

C. Pembahasan Hasil Penelitian

⁸¹Hasil Wawancara dengan Bapak Bakhtiar, S.Ag., M. H., (Kepala Bidang Ibadah dan Mu'amalah), hari Jumat tanggal 15 Juli 2016.

⁸²Hasil Wawancara dengan Bakhtiar, S.Ag., M. H., (Kepala Bidang Ibadah dan Mu'amalah), hari Jumat tanggal 15 Juli 2016.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bakhtiar, S.Ag., M. H., (Kepala Bidang Ibadah dan Mu'amalah), hari Jumat tanggal 15 Juli 2016.

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Bakhtiar, S.Ag., M. H., (Kepala Bidang Ibadah dan Mu'amalah), hari Jumat tanggal 15 Juli 2016

1. Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

- a. Implementasi Fungsi Perencanaan (*planning*)

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas beserta Kepala Bidang yang terdapat pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menjelaskan secara umum bahwasannya fungsi Perencanaan (*planning*) program telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis untuk mensinergikan antara kebutuhan masyarakat dengan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Adapun tahapan perencanaan yang dilakukan adalah:

- 1) Musyawarah pada tingkat Desa

Musyawarah pada tingkat Desa (Musrembang Desa) bertujuan untuk mengumpulkan usulan dari kalangan masyarakat tingkat keluarga ataupun tingkat kelompok terkecil dari masyarakat. Hasil dari musyawarah tingkat desa tersebut akan dibawa kepada tingkatan Musyawarah tingkat Kecamatan.

- 2) Musyawarah pada tingkat Kecamatan

Musyawarah tingkat Kecamatan merupakan lanjutan dari Musyawarah tingkat Desa. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan semua usulan masyarakat antar Desa yang terdapat dalam sebuah Kecamatan.

- 3) Musyawarah pada tingkat Kabupaten/Kota

Musyawarah tingkat Kabupaten/Kota merupakan lanjutan dari Musrembang tingkat Kecamatan. Hal ini juga bertujuan untuk mengumpulkan usulan dari masyarakat dari berbagai Kecamatan yang terdapat dalam sebuah Kabupaten/Kota.⁸⁵

4) Musrena (Musyawarah Rencana Aksi Wanita)

Musyawarah Rencana Aksi Wanita (Musrena) merupakan musyawarah yang dilakukan oleh kalangan perempuan untuk mengumpulkan aspirasi dan usulan dari mereka dan kemudian ditampung untuk dibahas dalam Forum SKPK (Satuan Kerja Perangkat Daerah).⁸⁶

5) Forum SKPK (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Forum SKPK (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah SKPK yang ada pada Kota Banda Aceh. Forum ini bertugas untuk membahas semua usulan yang telah dimusyawarahkan pada tingkat Musrembang Kabupaten/Kota.

6) Diinput oleh SKPK Dinas

SKPK Dinas adalah Bagian dari SKPK yang ada pada Kota Banda Aceh dan merupakan SKPK yang bertugas pada bagian Dinas-dinas di Kota Banda Aceh. Forum ini membahas usulan yang berhubungan dengan Tupoksi Dinas.

7) Pra RKA (Rencana Kegiatan Anggaran)

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Ida Friatna, M.Ag., (Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), Selasa tanggal 19 Juli 2016.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Ida Friatna, M.Ag., (Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), Selasa tanggal 19 Juli 2016.

Pra RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) adalah tahap sebelum RKA yang ditetapkan.

7) RKA (Rencana Kegiatan Anggaran)

RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) adalah lanjutan dari Pra RKA. Pada tahapan ini merupakan RKA yang telah disepakati oleh SKPK terkait.

8) DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) adalah daftar-daftar kegiatan beserta daftar anggaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan.⁸⁷

b. Implementasi Fungsi Pengorganisasian (*organizing*)

Sistem perekrutan karyawan, penempatan jabatan, pembagian tugas dan fungsi pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh melalui BKPP (Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan). Sedangkan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Mairul Hazami, SE., M. Si., (Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), hari Rabu tanggal 20 Juli 2016.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh hanya berwenang untuk mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Wali Kota Banda Aceh).⁸⁸

c. Implementasi Fungsi Pelaksanaan (*actuating*)

Sistem pelaksanaan program pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh berdasarkan Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang sebagaimana ditetapkan dalam SOTK Dinas Nomor 5 tahun 2007.⁸⁹ Setelah tupoksi dibagi menurut Bidang masing-masing, maka Tupoksi tersebut dibagi berdasarkan kepala Seksi yang terdapat dalam Bidang-bidang tersebut.⁹⁰

d. Implementasi Fungsi Pengawasan (*contolling*)

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang menjelaskan tentang sistem pengawasan yang dilakukan betingkat yaitu mulai Wali Kota terhadap Kepala Dinas, Kepala Dinas terhadap Kepala Bidang, pengawasan Kepala Bidang terhadap Kepala Seksi dan seterusnya pengawasan Kepala Seksi terhadap staf. Model

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Mairul Hazami , SE., M. Si., dan Ibu Ida Friatna, M. Ag., (Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), hari Selasa dan Rabu tanggal 19-20 Juli 2016.

⁸⁹ Himpunan Undan-Undang, Kepres, Keputusan Mahkamah Agung R.I, Perda/Qanun, Instruksi dan Edaran Gubernur, berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, edisi kesebelas (Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hal. 368.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Mairul Hazami , SE., M. Si., dan Ibu Ida Friatna, M. Ag., (Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), hari Selasa dan Rabu tanggal 19-20 Juli 2016.

pengawasan tersebut dilaksanakan melalui Laporan secara tertulis, Rapat Rutin, dan pengamatan langsung;

- 1) Laporan secara tertulis dari Kepala Dinas kepada Wali Kota Banda Aceh melalui *electronic* Kinerja (E-Kinerja)
- 2) Laporan kegiatan dari Kepala Bidang kepada Kepala Dinas melalui Rapat Rutin mingguan, serta
- 3) Pengamatan langsung oleh Kepala Bidang-bidang terhadap Kepala-kepala Seksi dan Staf.⁹¹

e. Implementasi Fungsi Evaluasi (*evaluating*)

Evaluasi mengandung pengertian pengukuran, penilaian yang bersifat hierarki dan dilaksanakan secara berurutan dan berkesinambungan.⁹² Model evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh melalui evaluasi setiap mingguan yaitu pada tiap hari Selasa dan evaluasi melalui laporan kinerja setiap tahunnya.⁹³

2. Strategi dalam mengimplementasikan manajemen secara efektif dan efisien pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

⁹¹ Hasil wawancara kepada Kepala Dinas, Seluruh Kabid dan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh (tanggal 14, 15, 19 Juli 2016) pada Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda.

⁹² Tatang S., *Ilmu Pendidikan*, cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 227

⁹³ Hasil wawancara kepada Kepala Dinas, Seluruh Kabid dan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh (tanggal 14, 15, 19 Juli 2016) pada Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda.

Strategi yang diterapkan oleh Bapak Mairul Hazami selaku Kepala Dinas Syariat Islam melalui: *pertama*: motivasi, yaitu suatu strategi yang bertujuan untuk memberikan kesadaran terhadap tanggung jawab kepada masyarakat melalui Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. *Kedua*: Keteladanan, yaitu suatu strategi untuk memberikan contoh yang baik mulai dari Kepala Dinas terhadap Kepala Bidang, Kepala Bidang terhadap Kepala Seksi dan Staf masing-masing Seksi. *Ketiga*: pendekatan, yaitu suatu strategi untuk mendekatkan diri antara Kepala Dinas dengan karyawan dengan membangun komunikasi melalui musyawarah dan Rapat Rutin, saling membantu dalam Tupoksi, serta shalat Ashar berjamaah di kantor Dinas.⁹⁴

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

a. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

Pada Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terlihat bahwasannya struktur Organisasi dan Tata Kerjanya secara umum mencakup; Kepala Dinas, Pejabat Fungsional, Sekretaris, Kepala Bidang (Kabid. Bina Ibadah dan Mu'amalah, Kabid. Dakwah, Kabid. Pengembangan Syariah dan Dayah, Kabid. Fardhu Kifayah), dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Kejanggalan dalam Struktur tersebut adalah adanya kekosongan pada Pejabat

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Mairul Hazami, SE., M. Si., dan Bapak Ridwan, S.Ag., M. Ag., (Kepala Dinas dan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), Rabu tanggal 20 Juli 2016.

Fungsional, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kepala Seksi Penertiban Makam pada Bidang Fardhu Kifayah.

b. Kesesuaian antara Bidang Studi dengan Jabatan

Secara keseluruhan Karyawan/ti Dinas Syariat Islam tidak ada kesesuaian antara Bidang Studi dengan Jabatan pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, serta Kepala-kepala Bidang pada Dinas Syariat Islam (kecuali pada Bidang Dakwah).⁹⁵

c. Kurangnya partisipasi masyarakat

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Syariat Islam; Bapak Mairul Hazami mengenai kendala yang dihadapi selama ini adalah dukungan masyarakat melalui partisipasi dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas masih kurang, seperti kegiatan Dakwah Islami, ceramah-ceramah dan kegiatan seminar pelatihan.⁹⁶

⁹⁵Hasil wawancara kepada Seluruh Kabid dan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh (tanggal 14, 15, 19 Juli 2016) pada Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda.

⁹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Mairul Hazami, SE., M. Si., (Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh), Rabu tanggal 20 Juli 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan membahas hasil mengenai Implementasi Manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang beralamat di Jln. Soekarno-Hatta Km. 2 Mibo Kota Banda Aceh, maka oleh karena itu penulis mengambil beberapa kesimpulan dan mengemukakan beberapa saran berdasarkan uraian serta pembahasan yang telah dibahas sebelumnya pada Bab IV.

Kata Implementasi dan Manajemen pada judul penelitian “Implementasi Manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh”, mengandung pengertian “pelaksanaan dan penerapan”. Sedangkan kata “manajemen” mengandung arti fungsi-fungsi dari manajemen tersebut, yang merupakan pengertian manajemen secara umum, mencakup beberapa fungsi yang saling terkait yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi. Untuk mengetahui Implementasi (Penerapan) Fungsi-fungsi Manajemen tersebut, maka peneliti melakukan penelitian melalui wawancara langsung kepada pihak yang terlibat dalam proses manajemen yang diterapkan pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, yaitu: Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala-kepala Bidang (Bidang Dakwah, Bidang Bina Ibadah dan Mu’amalah, Bidang Pengembangan Syari’ah dan Dayah, serta Bidang Fardhu Kifayah).

Secara umum pengimplementasian fungsi-fungsi manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yang terlihat dari proses perencanaan program, pembagian tugas dan fungsi sesuai SOTK Nomor 5 tahun 2007. Dalam melakukan pengimplementasian manajemen tersebut, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh; Bapak Mairul Hazami melakukan beberapa strategi dalam mencapai visi misi Dinas, yaitu melalui motivasi, keteladanan, pendekatan serta pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi).

Dalam pelaksanaan program selama ini, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh mengalami kendala dalam hal:

1. Kosongnya jabatan pada Pejabat Fungsional dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) serta pada Kepala Seksi Penertiban Makam pada Bidang Fardhu Kifayah
2. Kurangnya minat dari masyarakat untuk bekerja dan mengabdikan pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
3. Kurangnya tenaga yang profesional dalam bidangnya, serta
4. Kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan dan penerapan Syariat Islam khususnya di kawasan Kota Banda Aceh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin mengemukakan beberapa hal dalam tulisan karya ilmiah ini yang membahas tentang Implementasi Manajemen

pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Namun dalam menulis karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu, penulis akan mengemukakan beberapa saran bagi pihak terkait dalam penelitian pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada BKPP (Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan) selaku pelaksana dalam perekrutan, pelatihan dan pendidikan serta penempatan pegawai agar menempatkan pegawai pada Jabatan yang sesuai dengan bidang profesi sehingga lebih profesional dalam kinerja.
2. Kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh agar meningkatkan sistem manajemen yang menyangkut pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja dan kedisiplinan bawahan agar Dinas ini semakin bagus dan baik pada masa yang datang. Selanjutnya Kepada Kepala Bidang-bidang dan karyawan/ti pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh agar meningkatkan kedisiplinan dan pelayanan terhadap masyarakat agar visi dan misi Dinas sebagai Motivator Model Pencapaian Banda Aceh Model Kota Madani.
3. Kepada seluruh masyarakat kota Banda Aceh agar meningkatkan dukungan baik melalui ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh maupun dukungan yang berbentuk bantuan materil demi terwujudnya visi misi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dewi, Nasra, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Pembangunan Gampong di Kecamatan Sampoinet Kabupaten Aceh Jaya*. Skripsi, tidak diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*. Yogyakarta: UGM, 1997
- Haryanto. *Rasulullah Way Of Managing People: Seni Mengelola Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Khalifa dan Pustaka Al-Kautsa, 2008.
- Himpunan *Undang-Undang, Kepres, Keputusan Mahkamah Agung R.I, Perda/Qanun, Instruksi dan Edaran Gubernur, berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_khusus#cite_note-1. Diakses pada tanggal 14 Januari 2016.
- Maimun Ibrahim, et. al. *Pengantar Manajemen Dakwah*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, 2010.
- Matindas, R. *Manajemen SDM lewat Konsep AKU*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Muslich, *Bisnis Syari'ah: Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2007.
- Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang: *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012 -2017*.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang: *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Pasal 164.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang: *Pokok-Pokok Syariat Islam*
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

_____. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Strauss, Anselm, dan Corbin, Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

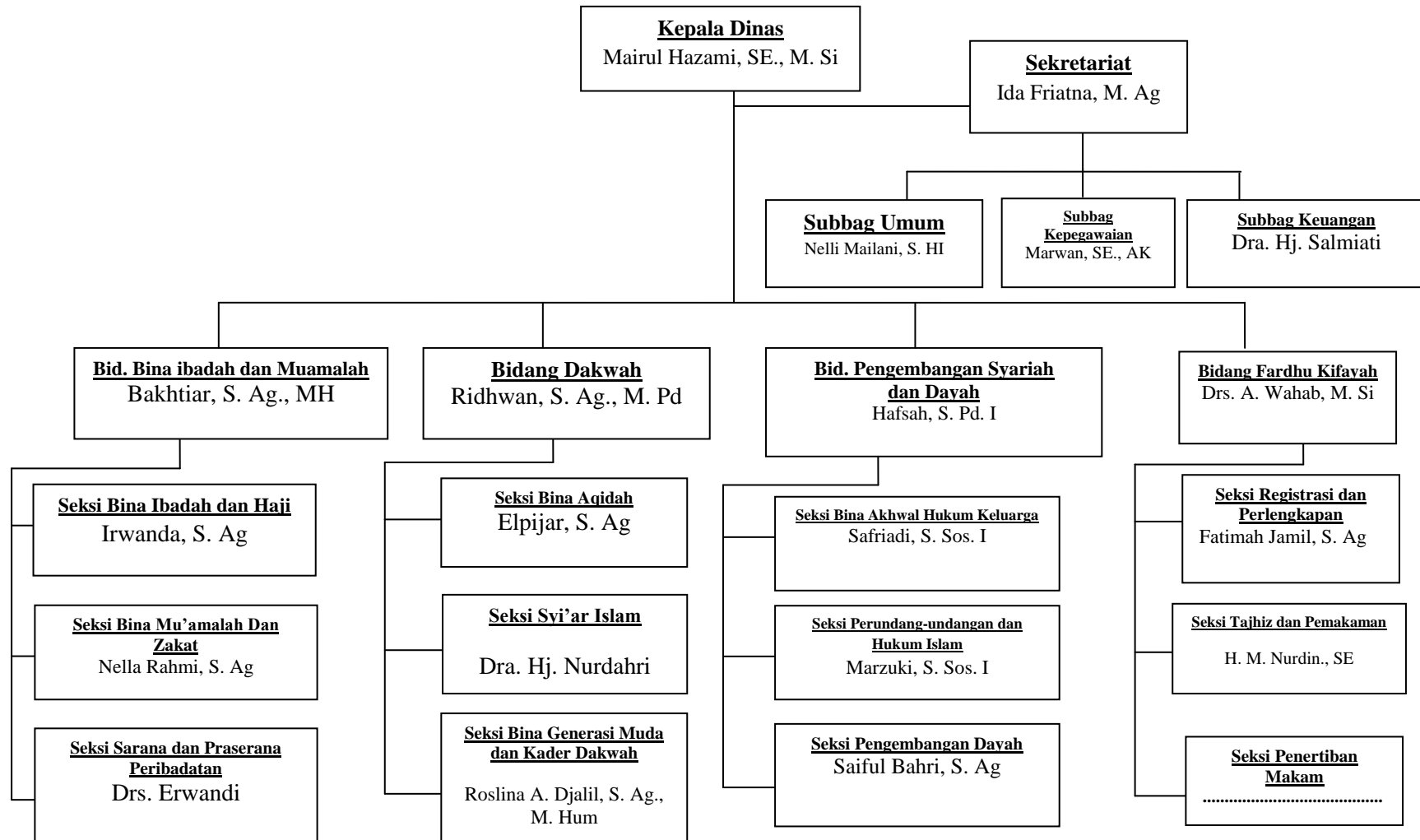
Tatang S. *Ilmu Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2013.

Yoga Putra, Tjandra. *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*. Jakarta: UI-Press, 2003.

Lampiran 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh



NO	Golongan	Jumlah		Jumlah (Orang)	Ket.
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/a	1	1	2	
3	III/d	7	6	13	
4	III/c	3	6	9	
5	III/b	3	3	6	
6	III/a	3	3	6	
7	II/d	1	-	1	
8	II/c	-	1	1	
9	II/b	-	3	3	
10	II/a	-	1	1	
11	I/c	-	-	-	
	Jumlah	19	24	43	
	Non PNS				
12	Honorar	1	1	2	
	Jumlah PNS+Non PNS	20	25	45	

Lampiran 3

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Jumlah (orang)	Ket.
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/a	1	1	2	
3	III/d	7	6	13	
4	III/c	3	6	9	
5	III/b	3	3	6	
6	III/a	3	3	6	
7	II/d	1	-	1	
8	II/c	-	1	1	
9	II/b	-	3	3	
10	II/a	-	1	1	
11	I/c	-	-	-	
	Jumlah	19	24	43	
	Non PNS				
12	Honorar	1	1	2	
	Jumlah PNS+Non PNS	20	25	45	

Jumlah Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	S-2	7
2	S-1	24
3	D III	4
4	SLTA	8
	Jumlah	43

Jumlah Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
Menurut Tingkat Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Orang
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kasubbag	3
4	Kabid	4
5	Kasie	12
	Jumlah	21

Lampiran 5

INSTRUMEN WAWANCARA

(Kepada Pimpinan/Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh)

1. Dinas Syariat Islam merupakan sebuah organisasi yang memiliki susunan organisasi, bagaimana model garis organisasi dalam susunan organisasinya...?
2. Bagaimana bentuk perencanaan program yang dilakukan pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh...?
3. Bagaimana proses perekrutan karyawan/ti yang dilakukan di Dinas Syariat Islam...?
4. Strategi apa saja yang dilakukan Dinas Syariat Islam dalam menjalankan semua program; baik program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang...?
5. Dari program tersebut, program apa saja telah berhasil dijalankan oleh Dinas Syariat Islam sampai saat ini dan faktor apa yang mendukung keberhasilan program tersebut...?
6. Adakah kendala Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan programnya, kalau ada apakah faktor yang menyebabkan hal tersebut...?
7. Apa kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat selesai melaksanakan suatu program...?
8. Bagaimana sistem pembagian tugas yang diterapkan pada Dinas Syariat Islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya...?
9. Apa upaya yang bapak/Ibu lakukan dalam menyatukan Visi dan Misi antara lembaga Dinas Syariat Islam dengan para karyawan pada setiap bidang yang ada...?
10. Pernahkah Dinas Syariat Islam mengalami kegagalan dalam menjalankan program yang sudah direncanakan...?
11. Apa langkah Dinas Syariat Islam dalam penerapan Syariat Islam pada masa yang akan datang...?
12. Bagaimana Bapak/Ibu melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kinerja para karyawan pada Dinas Syariat Islam ini...?
13. Pernahkah bapak / Ibu melakukan evaluasi terhadap kinerja para karyawan Dinas Syariat Islam...?
Evaluasi yang Bagaimana yang bapak / Ibu lakukan...?

Lampiran 6

INSTRUMEN WAWANCARA

(Kepada Karyawan/i Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh)

1. Bagaimana sistem perencanaan di Bidang dalam mendukung Visi dan Misi Dinas Syariat Islam...?
2. Apa fungsi Bidang..... pada saat penyusunan program Tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh...?
3. Bagaimana sistem pelaksanaan fungsi tersebut...?
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu sebagai karyawan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tentang proses pembagian tugas yang diterapkan di lembaga ini...?
5. Apakah ada kesesuaian antara profesi Bidang Studi Bapak/Ibu dengan jabatan saat ini...?
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang permasalahan tersebut, alasan setuju atau tidak....?
7. Pada saat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh melaksanakan salah satu program, penguatan Syariat Islam, misalnya, apa peran yang bebaskan pada Bidang..... ?
8. Program apa yang menjadikan Bidang ini sangat berperan penting dalam pelaksanaannya....?
9. Siapa yang bertanggungjawab dalam melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap kinerja Bidang ?
10. Bagaimana sistem pengawasan yang diterapkan oleh pimpinan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam mengawasi kinerja karyawan/karyawatinya....?
11. Pengawasan yang seperti apa yang dilakukan selama ini....?
12. Bagaimana model evaluasi terhadap pencapaian, baik program yang telah dilaksanakan maupun kinerja karyawan pada Bidang..... di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh....?
13. Siapa yang bertugas melakukan evaluasi tersebut....?

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.07/FDK/KP.00.4/ 494 /2016

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1) Drs. H. Maimun Ibrahim, MA (Sebagai Pembimbing Utama)
2) Sakdiah., S.Ag., M.Ag (Sebagai Pembimbing Kedua)
Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Firman Sahputra
NIM/Jurusan : 431206915/ Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Implementasi Manajemen pada Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 26 Pebruari 2016 M
17 Jumadil Awal 1438 H
an.Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan



Drs. A. Rafii, M. Si.
NIP. 19631231 199303 1 035

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 25 Pebruari 2017.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : Un.08/FDKI/PP.00.9/2471/2016

Banda Aceh, 23 Juni 2016

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

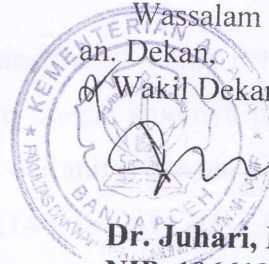
Nama /Nim : **Firman Syahputra/431206915**
Semester/Jurusan : VIII/Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Jln. T. Nyak Arief Desa Lamgugop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Manajemen pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik. ۞



Dr. Juhari, M. Si

NIP. 196612311994021006



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH
Jln. Soekarno-Hatta Km 2 Mibo Banda Aceh

Banda Aceh, 01 ~~Desember~~ 1437 H
01 Agustus 2016 M

Nomor : Peg.800/389 /2016.
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa.**

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Dakwah & Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar- Raniry
di -

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

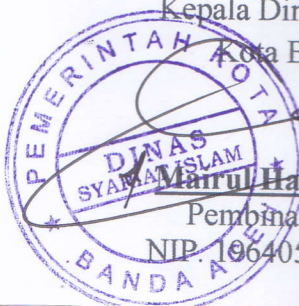
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: UN.08/FDK.I/PP.00.9/2471/2016 tanggal 8 Maret 2016, hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :

Nama : Firman Syahputra
NIM : 431206915
Semester : VIII
Jurusan : Manajemen Dakwah
Alamat Sekarang : Jln. T. Nyak Arief Desa Lamgugop

Telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah untuk Penulisan Skripsi pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dalam rangka studinya pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul : **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN PADA DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH”**.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terimakasih.

Kepala Dinas Syariat Islam
Kota Banda Aceh



Mairul Hazami, SE, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 10640506 198603 1 003

Lampiran 10

Foto sidang bersama Pembimbing dan Penguji



Foto 1 : Foto pada saat sidang berlangsung (Selasa, 09/08/2016)



Foto 2: Foto pada saat selesai sidang bersama Pembimbing dan Penguji (Selasa, 09/08/2016)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Firman Syahputra
2. Tempat / Tgl. Lahir : Tanah Munggu / 5 Agustus 1993
Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan.
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 431206915
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Jl. T NyakArief, Desa Lamgugob
 - a. Kecamatan : Syiah Kuala
 - b. Kabupaten/Kota : Banda Aceh
 - c. Provinsi : Aceh
8. Nomor *Handphone* (Hp) : 0823-6875-5614

Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : SD Negeri Tanah Munggu (2000-2006)
10. SMP/MTs : MTsS Darul Aitami (2006-2009)
11. SMA/MA : MAS Darul Aitami (2009-2012)
12. PTN/PTS : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2012-2016)

Orang Tua Wali

13. Nama Ayah : Abdullah Amin (Alm)
14. Nama Ibu : Nurasabitah
15. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Ayah (-)
 - b. Ibu (Petani)
16. Alamat Orang Tua : Dusun Tanah Munggu, Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan

Banda Aceh, 09 Agustus 2016 M
06 Dzulqa'idah 1437 H

Peneliti,

(Firman Syahputra)
NIM. 431206915